

Dinamika Perkembangan Islam Politik di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern

Yudi Armansyah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
y_armansyah@yahoo.co.id

Abstract

Historically, Indonesia was once a political force that counts the world. It was marked by the birth of political forces during the Hindu Buddhist kingdom until the Islamic sultanate. Ironically, the final phase of the power of political Islam, began to decline since the arrival of colonialism, especially the Dutch colonization that fundamentally colonized in 350 years. But it does not necessarily discourage Islam Politics grow and flourish in the archipelago. Even since Indonesia became independent until it changed into the period of the three Order Lama regimes, the Order Baru and Islamic political reforms remain the barometer of Indonesia's political power. This article is about to unravel the dynamics of the development of political Islam in Indonesia. Where can be classified into two phases, namely the traditional-royal phase, the modern phase. From the results of this study, there are at least two patterns of development of the political power of Islam in Indonesia, which can survive despite real "pressure" from the ruling that is on the political and cultural fields

Keywords: *dynamics, entity, political Islam and cultural.*

Abstrak

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dunia. Hal itu ditandai dengan lahirnya kekuatan-kekuatan politik pada masa kerajaan Hindu-Budha hingga kesultanan Islam. Ironisnya, fase akhir dari kekuatan Islam politik tersebut, mulai mengalami kemunduran sejak kedatangan kolonialisme, terutama penjajah Belanda yang secara fundamental menjajah dalam kurun 350 tahun. Namun, hal itu tidak lantas menyurutkan Islam politik tumbuh dan berkembang di Nusantara. Bahkan sejak Indonesia merdeka hingga berganti ke masa tiga rezim Orde Lama, Orde Baru dan reformasi Islam politik tetap menjadi barometer kekuatan politik di Indonesia. Artikel ini hendak mengurai dinamika perkembangan Islam politik di Indonesia. Di mana dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu fase "tradisional-kerajaan" dan fase modern. Dari hasil kajian ini, setidaknya terdapat dua pola perkembangan kekuatan Islam politik di Indonesia, yang nyatanya dapat survive meskipun menghadapi "tekanan" penguasa yaitu, pada bidang politik dan kultural.

Kata Kunci: *dinamika, entitas, islam politik, kultural*

PENDAHULUAN

Islam dan politik adalah sebuah keterpaduan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para pakar politik Barat mengakui tentang integrasi keduanya, seperti Dr. V. Fitzgerald, ia berkata, “Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”¹

Hal inilah yang pada akhirnya turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan politik Islam di Nusantara. Indonesia yang mula-mula merupakan basis dari kekuatan Hindu-Budha lambat laun menjadi pusat perkembangan dari teritori kekuasaan Islam, hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam sebagai manifestasi atas pembasisan kekuatan politik, selain itu berdirinya kerajaan tersebut dapat mengungguli kawasan dunia lainnya yang selama berabad-abad menjadi patronase kesuksesan ekspansi Islam.

Kekuatan politik Islam Nusantara mengalami masa suram saat kehadiran para penjajah dari Barat. Dimulai dengan munculnya Portugis, Inggris, dan Belanda semuanya menutup akses institusi politik Islam untuk mengembangkan diri, meskipun banyak terjadi perlawanan-perlawanan baik dari para sultan, kaum bangsawan, ulama hingga rakyat jelata. Akan tetapi tetap saja institusi politik Islam terbelenggu dalam jerat kolonialism.

Pada masa kemerdekaan (tepatnya masa Orde Lama dan Orde Baru) sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan Islam politik. Paham nasionalis mampu mengalahkan ide keislaman, sehingga pada masa ini Islam menjadi lemah di tengah jumlah penganutnya yang mayoritas. Sentralnya kepemimpinan Indonesia dengan menjadikan militer sebagai basis kekuatan politik membuat posisi Islam terjepit untuk mengembangkan peradabannya, masa ini hanya terjadi sedikit resistensi dari kekuatan Islam politik.

¹Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 5

Masa reformasi yang dianggap sebagai titik kebangkitan politik di Indonesia ternyata tidak mampu diterjemahkan oleh umat Islam untuk merebut kepemimpinan politik Indonesia yang sempat hilang pasca lengsernya Soeharto. Fase ini justru hanya melahirkan partai-partai oportunistik yang hanya menjadikan biasnya dalam kekuatan Islam politik. Terbukti, partai-partai Islam pada masa ini secara elektabilitas tidak memperoleh dukungan suara mayoritas dari umat Islam sendiri.

Masalah utama yang akan dibahas dalam artikel ini berhubungan dengan kekuasaan, sistem dan proses politik yang dibangun umat Islam Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan, kolonialisme hingga masa kemerdekaan yang terbagi menjadi tiga masa yaitu, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Mungkin artikel ini menjadi pembahasan yang tidak mengenal *unlimited*, karena pembahasannya sangat kompleks deskriptif-historis yang dipadu-seragamkan dengan perkembangan dan pertumbuhan Islam politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perkembangan Islam Politik Masa Tradisional-Kerajaan

Islam Nusantara telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII. Namun, institusi politik di beberapa daerah tidaklah sama. Di Sumatera, ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad XIV atau abad XV. Abad ke XVI telah menjadi saksi munculnya kerajaan-kerajaan baru di medan sejarah, terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan-kerajaan itu lazim disebut kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pedalaman masih bersifat Hindu. Perkembangan kerajaan Islam di daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan di daerah lain mulai juga tampak pada abad ke XVI. Sementara itu masih terdapat kerajaan-kerajaan yang terus eksis dengan memakai sistem tradisional pra-Islam,² seperti kerajaan Mataram di Jawa.

Dalam hal ini kerajaan Islam umumnya berdiri setelah jatuhnya kerajaan Hindu-Budha. Sehingga membuat Islam pada saat itu menjadi satu-satunya basis kekuatan politik. Kekuatan pertama kekuasaan Islam terletak di kota Samudera. Daerah ini kemudian terkenal dengan sebutan Pasai. Kota ini tidak berapa lama menjadi sebuah kerajaan yang kuat

²Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jilid I, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hlm. 45

setelah Islam dapat diterima oleh penduduk setempat dan menemukan pijakannya yang kokoh dikota itu. Samudera Pasai selanjutnya merupakan bagian dari wilayah Aceh. Aceh sendiri menerima pengislaman dari Pasai pada pertengahan abad XVI, kerajaan Aceh bermula dari penggabungan dua negeri kecil, Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal pada abad ke-10 H/XVI M.³

Di Jawa, kerajaan Demak (1518-1550 M) dipandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini berdiri setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada 1527 M. Menurut tradisi Jawa Barat (sejarah Banten), konfrontasi antara Demak dan Majapahit berlangsung beberapa tahun. Dua kekuatan yang berhadapan adalah antara barisan Islam Demak, yaitu para ulama dari Kudus, imam Masjid Demak, di bawah pimpinan Pangeran Ngudung, melawan Majapahit yang dibantu vasal-vasalnya dari Klungkung, Pengging, dan Terung.⁴

Reposisi perubahan pusat kekuasaan Islam terjadi setelah berdirinya kerajaan Pajang pada akhir abad XVI. Di mana, pusat kekuasaannya terletak di daerah pedalaman dan lebih bersifat agraris. Dengan berdirinya kerajaan Pajang ini maka berakhirilah dominasi kerajaan-kerajaan pantai dalam politik Islam di Jawa. Daerah pedalaman ini kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar.

Di wilayah Indonesia Timur muncul kerajaan-kerajaan di Maluku, Makasar, Banjarmasin, dan sebagainya. Pada permulaan abad ke XVI, kerajaan Ternate mulai maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Aktivitas perdagangan ini dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke Maluku, khususnya Ternate dan Tidore, perdagangan ini bertambah ramai setelah kedatangan para pedagang Arab.⁵

Hubungan antar kerajaan-kerajaan Nusantara juga terlihat dalam berbagai kesempatan dibidang politik, contohnya persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa, persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan

³Nor Huda, *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 65

⁴Nor Huda, *Ibid*, hlm. 67

⁵Nor Huda, *Ibid*

Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan.⁶ Jaringan komunikasi yang terbangun antara kerajaan Islam telah tercapai dengan sangat erat sehingga dalam beberapa periode lamanya kerajaan Islam dapat terus eksis hingga kehadiran para penjajah Barat.

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai masa kemunduran kerajaan Islam dan kondisi Nusantara yang terjajah. Dimana, deskripsinya terlihat dari keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad-16 M dan awal abad-17 M ke Indonesia yang berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga proses Islamisasinya. Di Sumatera, penduduknya sudah Islam sekitar tiga abad, semetara di Maluku dan Sulawesi proses Islamisasi baru saja berlangsung.⁷

Dapat dikatakan masa kolonialisme menjadi fase berakhirnya dominasi politik Islam. Meskipun ada beberapa daerah yang tetap kuat mempertahankan diri dari serangan penjajah, namun superioritas Belanda menjadi semakin dominan dalam berbagai bidang. Hanya Sumatera yang diwakili oleh Aceh dan Sumatera Barat, yang mampu bertahan beberapa tahun lamanya untuk tidak dijajah. Selebihnya, kerajaan-kerajaan dan institusi Islam hampir pasti semua tunduk terhadap Belanda.

Diawali dengan kehadiran orang-orang Portugis ke Indonesia dengan motif agama, ekonomi, dan pertualangan, mulai mengusik kerajaan Islam di Indonesia.⁸ Walaupun demikian banyak kerajaan-kerajaan Islam dapat mengatasi orang-orang Portugis, karena bangsa Portugis hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap kebudayaan Nusantara yang bersendikan Islam.

Kehadiran orang-orang Belanda di Indonesia juga sangat mengancam institusi perpolitikan umat Islam. Ancaman ini terlihat manakala keinginan memonopoli perdagangan timbul, orang-orang Belanda pun mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam yang pada umumnya tidak stabil. Pada Maret 1602, Belanda mendirikan VOC (*Verrenigde Oost-Indische Compagnie*) atau perserikatan Maskapai Hindia-Timur

⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 224

⁷*Ibid*, hlm. 231

⁸Marwati Djoned Puspongoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, hlm. 45

untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang Barat lainnya.⁹ Dengan politik “belah bambu” satu demi satu kerajaan Islam hancur. Apabila kerajaan itu masih berdiri. Maka hegemoni dan pengaruh VOC cukup kuat disana. Karenanya kerajaan itu hanya sebagai bayangan dari VOC.

Namun, setidaknya ada empat usaha perjuangan umat Islam dalam mengusir kolonialisme Belanda: *Pertama*, perlawanan dan pertentangan yang dilakukan oleh para Sultan. Pada masa ini para Sultan telah berusaha keras mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik dari pengaruh Belanda. *Kedua*, perlawanan kaum bangsawan yang memandang kekuasaan sultan semakin lemah akibat hegemoni Belanda. *Ketiga*, perjuangan para ulama menentang kekuasaan asing. *Keempat*, gerakan protes rakyat.¹⁰ Dari keempat jalur perjuangan fase ini, terlihat kekuatan para sultan masih dominan memimpin perjuangan dari intervensi penjajah.

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti, karena itu raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan, kewibawaan raja sangat bergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial terhadap kehidupan keraton makin meluas, sehingga ulama-ulama keraton sebagai penasihat raja-raja tersingkir.¹¹ Akibat menyempitnya kekuasaan para raja Islam akibat kekuasaan Belanda, maka kekuatan politik berpindah dari istana, salah satunya ke pesantren-pesantren yang kemudian menjadi basis perlawanan dengan dipimpin oleh para ulama.

Munculnya ulama tidak lepas dari kapasitasnya sebagai satu-satunya komunitas independen baik secara otoritas, jumlah dan pengaruhnya yang luas. Hal ini tercermin pada saat mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan pengembaraan studi agama yang luas di Arab yang telah mengantarkan kontak dunia Muslim Melayu dan Indonesia dengan ajaran-ajaran reformis, meningkatkan kesadaran mereka terhadap

⁹*Ibid*

¹⁰Nor Huda, *Ibid*, hlm. 82. Lihat Andi Faisal Bakri, *Islam and Nation Formation in Indonesia*, hlm. 63-64

¹¹Musrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 29

identitas Muslim dan menjadikan mereka mengenal perlawanan dunia Muslim terhadap kolonialisme Eropa.¹²

Beberapa gerakan politik dalam rangka mengusir Belanda dari Nusantara yang dipelopori para ulama, diantaranya yang termasyhur adalah perang Paderi (1821-1837 M) di Minangkabau dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perang Jawa (1825–1830 M) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro didampingi Kiai Mojo¹³, perang Banjarmasin (1857 – 1905 M) dan perang Aceh (1873 – 1904 M) yang dipimpin oleh Panglima Polim dengan sebelas orang ulama Aceh. Para ulama tersebut menjadi konduktor perjuangan dengan memobilisasi massa Islam untuk mempertahankan tanah airnya dari penjajahan.

Lambat tapi pasti muncul kesadaran dari umat Islam untuk merubah bentuk perlawanan terhadap Belanda yang selama ini dilakukan dengan konfrontasi fisik. Trend baru perjuangan dengan organisasi menjadi pilihan strategis dimana banyak terdapat ruang yang bisa dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan. Bidang sosial dan pendidikan menjadi pilihan ideal kala itu sehingga dalam perkembangannya organisasi tersebut dapat menyatukan basis kekuatan massa baik di daerah maupun Nusantara secara luas seperti organisasi Sumatra Thawalib dan Syarikat Islam. Demikian juga K.H. Ahmad Dahlan di Jawa dengan gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdhalatul Ulama.

Sebenarnya ide seperti ini timbul dari kalangan yang terpelajar yang pernah dididik di negeri Belanda. Sementara itu pendidikan Barat pada akhirnya melahirkan golongan nasionalis sekuler. Golongan ini bertemu dengan golongan Islam dengan rasa nasional, kemudian saling bahu membahu dalam memperjuangkan pembebasan tanah air mereka bersama, meskipun terjadi persaingan ketat antar keduanya.¹⁴ Dengan kata lain abad 20 banyak melahirkan berbagai pergerakan Nusantara yang lebih modern, perubahan sosial yang terjadi selama ini menggunakan kekuatan fisik dalam menghadapi penjajah tidak menjadi *trend topic*. Ide

¹²Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1999), hlm. 321

¹³Taufik Abdullah, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 1991, hlm. 141

¹⁴Lihat Abdul Karim, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 19

pergerakan melalui organisasi menjadi jawaban yang harus dipilih dan ternyata sangat tepat.

Lahirnya Organisasi Keislaman Modern Syarikat Islam

Syarikat Islam sendiri dilahirkan di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 dengan sifat nasional dan dasar Islam yang tangguh. SI adalah organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air. Sifat *nasional* itu untuk membedakannya dengan *regional*, lokal kedaerahan seperti yang dianut oleh Budi Utomo. Dengan sifat nasionalnya itu, Syarikat Islam meliputi seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Lihatlah para tokohnya seperti Samanhudi, Cokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur. Agus Salim dan Abdoel Moeis berasal dari Sumatera Barat, dan A.M. Sangadji dari Maluku.¹⁵

Lebih lanjut Firdaus A.N menyatakan bahwa sebenarnya Syarikat Islamlah yang pertama dan berperan besar dalam menyatukan bangsa Indonesia bukan organisasi Budi Utomo. Hal ini dapat dilihat dari komentar dari Hamid Algadri, Ketua Perintis Kemerdekaan Indonesia dalam wawancaranya dengan Republika tentang Budi Utomo yang menyatakan seperti ini: “Sebetulnya ketika Budi Utomo berdiri kita akan tahu mereka murid-murid Belanda yang tidak tahu banyak tentang sejarah Islam. Bahkan pergerakan nasionalis mula-mula itu anti Islam dan anti Arab”. (Republika, 23-8-1996).

Berdirinya Syarikat Islam sebenarnya menunjukkan eksistensi umat Islam dan sangat wajar apabila organisasi ini dapat berperan sampai sejauh itu karena berbagai basis kekuatan politik Indonesia adalah umat Islam itu sendiri yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Langkah ini dapat menemukan akomodasinya ketika pada saat itu umat Islam tidak memiliki wadah perjuangan yang terorganisir dengan baik. Syarikat Islam menjadi jawaban atas problematika penindasan kaum penjajah.

Dari organisasi ini akhirnya lahir Serikat Dagang Indonesia (SDI) yang lahir di Solo pada 1911. Organisasi dagang ini merupakan usaha

¹⁵Firdaus, A.N, Syarikat Islam Bukan Budi Utomo; Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa, (Jakarta: Datayasa, 1997), hlm. 9

untuk menandingi dominasi pengusaha Tionghoa yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Hindia Belanda.¹⁶

Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Ia ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Meskipun secara prinsipil Muhammadiyah lahir bukan sebagai organisasi politik melainkan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan.¹⁷

Lahirnya Muhammadiyah menjadi salah satu gerakan pembaharuan di Nusantara, meskipun secara konkrit telah ada gerakan serupa yang di pelopori oleh kaum Paderi pada 1803-1804 M melalui tokoh pembawanya yang berafiliasi dengan gerakan Wahhabi di Arab yaitu Haji Miskin dan Lu(h)ak Agam.¹⁸ Akan tetapi perjuangan Muhammadiyah lebih melembaga dan terkonsep dengan baik dibanding dengan gerakan pembaharuan Paderi tersebut. Kala itu juga kondisi “entitas budaya” masih sangat tinggi, belum lagi dominasi Belanda terhadap Nusantara masih sangat berpengaruh kuat. Sehingga dengan sedikit “intrik” dan kekuatan senjata Belanda dapat dengan mudah melumpuhkan pergerakan seperti ini.

Latar belakang lahirnya Muhammadiyah dapat di klasifikasikan menjadi dua faktor; *Pertama*, faktor internal. Di mana, kondisi keberagamaan dan sistem pendidikan Islam telah jauh dari falsafah al-Quran dan hadis. Umat Islam kala itu jauh dari sikap beragama yang ideal, mereka hanya mengedepankan sikap taklid sehingga memunculkan sikap syirik dan bid'ah. Wahana rasionalitas dengan ditunjang pendidikan yang mapan juga sangat jauh dari pemikiran umat Islam. Akhirnya cita-cita puritanism menjadi tujuan mutlak para tokoh Islam seperti Ahmad Dahlan, hal ini hampir sama dengan gerakan pembaharuan di kawasan Islam lainnya di abad modern.

¹⁶ Abdul Karim, Ibid, hlm. 22

¹⁷Lubis Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: PT. Karya Uniperss, 1989), hlm. 56

¹⁸Dobbin, “*Echonomic Change in Minagkabau as a Factor in The Rice of Paderi Movement, 1784-1830*”, *Jurnal Indonesia* Vol. 23 (April 1977), hlm. 1-21. Dalam <http://ww.mailchive.com/> Online 5 Maret 2010

Kedua, faktor eksternal. Lebih disebabkan oleh politik penjajahan Belanda di Nusantara yang berimplikasi pada sistem pendidikan kolonial, westernisasi dan kristenisasi di Nusantara. Untuk menangkal pemahaman ini maka Muhammadiyah aktif bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan bersendikan Islam.

Nahdhalatul Ulama

K.H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Sa'ban 1344 H/ 31 Januari 1926 M,¹⁹ di Jombang Jawa Timur mendirikan *Jami'iyah Nahdhotul Ulama'* (kebangkitan ulama) bersama K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Wahab Hasbullah dan ulama-ulama besar lainnya, dengan azas dan tujuan: "Memegang dengan penuh pada salah satu mazhab empat yaitu imam Muhammad bin Idris Asyafi'I, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'am dan Ahmad bin Hambali.

Nahdhalatul 'Ulama adalah organisasi sosio-kultural berbasis pedesaan yang konservatif dengan anggota kurang lebih 35 juta orang (sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia)²⁰. Faktor berdirinya NU adalah, *pertama*, reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis dan kelompok modernis moderat. *Kedua*, pengaruh dari konflik yang terjadi di Timur Tengah sehingga menciptakan lahirnya gerakan serupa di dunia Islam.

Pada awal berdirinya NU berorientasi pada persoalan agama dan kemasyarakatan, kegiatan diarahkan pada persoalan pendidikan, pengajian dan tabligh. Namun, memasuki dasawarsa kedua orientasi diperluas pada persoalan-persoalan nasional. Hal tersebut terkait dengan keberadaannya sebagai anggota federasi Partai dan Perhimpunan Muslim Indonesia (MIAI) NU bahkan pada perjalanan sejarahnya pernah tampil sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu, yang kemudian menyatu dengan PPP. Peran NU dalam politik praktis ini kemudian dianulir dengan keputusan Muktamar Situbondo yang menghendaki NU hanya sebagai organisasi sosial keagamaan kembali pada khitohnya.²¹

¹⁹Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 51

²⁰L. Esposito-John O. Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, hlm. 256

²¹<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan-amiyah/> diakses tanggal 26-04-2011. hlm. 2

Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Jawa. Masa penjajahan Jepang memang sebentar hanya kurang lebih tiga tahun, akan tetapi masa singkat tersebut menjadi anti-klimaks buat bangsa Indonesia. Banyak kebijakan Jepang yang sangat merugikan, sebagai penjajah Jepang jauh lebih kejam daripada Belanda, Jepang merampas semua harta milik rakyat untuk kepentingan perang

Era penjajahan Jepang dalam kaitannya dengan posisi politik umat Islam memunculkan fenomena yang sama sekali berlainan dengan fenomena zaman Belanda. Jika Belanda lebih menampakkan sikap anti Islam, Jepang justru memperlihatkan sikap “bersahabat” terhadap umat Islam di dalam dunia kepolitikan di Indonesia. Meskipun demikian tujuannya dari Jepang hampir sama yakni bagaimana melanggengkan kekuasaan penjajah di negeri ini.²²

Kondisi politik umat Islam pada masa ini terbagi menjadi dua yakni, *pertama*, masa revolusi dan *kedua*, masa mempertahankan kemerdekaan. Tidak dipungkiri strategisnya posisi umat Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia. Islam ternyata dapat memainkan perannya dalam membangkitkan semangat revolusi mengusir kolonialisme di Nusantara.

Fase ini dapat dibilang menjadi “perang ideologi” antara para tokoh berideologi sekuler dengan berideologi Islam. Hal ini terlihat pasca proklamasi di mana muncul pertentangan dari kedua golongan tersebut yang berafiliasi dengan nasionalis “sekuler” dan nasionalis Islam itu sendiri. Pergulatan hebat itu semakin meruncing dengan dihapuskannya tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila Pertama Pancasila yang pada akhirnya dengan segala konsekuensinya dipinggirkan dari substansi konstitusi. Awalnya sila Pertama Pancasila berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” Dirubah menjadi hanya: “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kebijakan yang mewakili suara umat Islam pada saat itu adalah keputusan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pengganti PPKI, yang bersidang pada tanggal 25, 26 dan 27 November 1945. Komite yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, pimpinan utama Partai Sosialis Indonesia (PSI) itu antara lain membahas usul agar dalam Indonesia merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh satu kementerian tersendiri

²²Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 34

dan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Sedikit banyak keputusan tentang Kementerian Agama ini merupakan konsesi kepada kaum Muslimin yang bersifat kompromi; kompromi antara teori sekuler dan teori muslim.²³

Puncak kemenangan kaum nasionalis ialah dengan diberlakukannya sistem Republik dalam negara Indonesia dan ditetapkannya sistem politik yang mendasarkan pada konstitusi tertulis. Ada tiga konstitusi tertulis yang pernah berlaku yaitu UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama dan masih berlaku hingga sekarang ini, konstitusi ini disusun dan diundangkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konstitusi ini dapat dikatakan konstitusi terpendek di dunia karena hanya terdiri atas 37 pasal.²⁴

Ketentuan pokok mengenai sistem politik yang diatur dalam konstitusi tertulis ini antara lain adalah:²⁵

1. Bentuk negara kesatuan Indonesia adalah Republik. Dengan demikian kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR ini keanggotannya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), suatu badan yang mempunyai peranan legislatif yang dipilih secara berkala lima tahun sekali melalui pemilihan umum, ditambah dengan golongan-golongan serta Utusan Daerah yang jumlah dan pengaturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Sistem Pemerintahan yang digunakan adalah presidensial. Dengan demikian presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai penerima mandat dari MPR, maka presiden bertanggung langsung kepada MPR. Untuk memperlancar tugasnya presiden disamping sebagai kepala eksekutif juga dilengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yang dimaksud adalah di dalam perumusan undang-undang. Undang-undang dibuat presiden bersama DPR. Di samping undang-undang,

²³Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 60

²⁴Carlton Clymer Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 478

²⁵Lihat Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

presiden juga menetapkan peraturan pemerintah. Sementara kekuasaan yudikatif tercermin dari haknya untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, Sistem Pemerintahan di Indonesia tidaklah mengikuti asa Trias Politika secara murni.

3. Secara operasional, fungsi legislatif dan pengawasan dilakukan oleh DPR. Badan ini bersama-sama dengan presiden bertugas merumuskan undang-undang. Di samping itu, DPR juga bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah, apakah telah sesuai dengan GBHN yang ditetapkan MPR. Meskipun presiden tidak bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada MPR, badan ini tidaklah lemah; sebab DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, dan di dalam melaksanakan fungsi pengawasan ia diberi sejumlah hak.
4. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan susunan yang diatur oleh undang-undang. Mahkamah Agung merupakan badan yang lepas dari pengaruh pemerintah

Akan tetapi tetap ada sumbangan pemikiran dari kaum Muslimin dalam sistem politik Indonesia yaitu, ditetapkannya asas musyawarah dalam penentuan kebijakan pemerintah. Wujud dari musyawarah yang kini hidup subur di bumi Indonesia benar-benar tercerminkan bagi sikap tingkah laku dan perbuatan, baik di pemerintahan tingkat atas hingga pemerintahan tingkat bawah sekalipun di sana sini masih perlu disempurnakan. Apabila di lembaga pemerintahan tingkat pusat terdapat MPR,²⁶ maka di daerah terdapat MUSPIDA, di Kecamatan terdapat MUSPIKA, dan akhirnya di tingkat Kelurahan unit terkecil dalam pemerintahan terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perkembangan Islam Politik: Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.²⁷ Oleh karenanya politik Islam masa Orde Lama dan Orde Baru lebih

²⁶Team Pembinaan Penatar dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Bahan*, hlm. 69

²⁷Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. I.

mengasosiasikan diri dalam aturan yang lebih struktural, hal ini akibat dari konsekuensi logis menerima sistem demokrasi yang ditawarkan Barat, hal lainnya karena demokrasi dianggap sebagai pilihan realistis ditengah bangsa yang plural.

Masa Orde Lama terjadi ketidakstabilan politik, banyak terjadi pertentangan yang muncul. Partai-partai politik di parlemen tidak mampu bekerjasama untuk membentuk satu sistem politik yang kuat termasuk partai Islam. Saat itu partai politik yang paling terkenal dalam menegakkan kemerdekaan berpikir ialah Masyumi (Madjilis Sjura Muslim Indonesia). Tokoh-tokoh di kalangan Masyumi ini sebagian keluaran dari al-Azhar dan Kairo University yang banyak membaca buku-buku terbitan Mesir, sehingga pola pemikirannya dipengaruhi oleh Revolusi Perancis.²⁸

Eksistensi Masyumi sebagai partai besar yang menjadi satu-satunya wadah politik umat Islam Indonesia tidak menemukan tempatnya manakala pemerintahan yang dibangun Kabinet Sjahrir pada 14 November 1945 tidak mengakomodasi para menteri yang mewakili kalangan politisi Muslim, terhitung hanya H. Rasjidi (Menteri Negara) dan kemudian pada 3 Januari 1946 M. Natsir (Menteri Penerangan) akan tetapi keduanya diangkat menjadi menteri dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan Masyumi.²⁹

Masa Orde Baru ditandai dengan pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pada 1968. Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka akhirnya dilaksanakan pada 1971, rezim Soeharto tidak memberikan tempat kepada sebagian partai atau politisi yang telah mendapat kedudukan penting pada masa Presiden Soekarno. Uniknya baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara nasionalis. Atas dasar inilah sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemimpin tersebut berupaya untuk melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam.³⁰

²⁸Abdul Karim, *Ibid*, hlm. 77

²⁹Anwar Harjono, *Ibid*, hlm. 87

³⁰Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta:Paramadina, 1998), hlm. 2-3

Masa Soeharto juga mencatat munculnya kembali tema “Islam dan kebangsaan”, tema ini menjadi diskursus penting di kalangan masyarakat Indonesia mengingat sejak masa-masa awal orde baru gerakan Islam sering disinyalir sebagai gerakan ekstrem yang mencoba menggoyahkan sendi dasar negara Indonesia. Pengalaman historis menunjukkan, gerakan ideologis Islam itu memang pernah muncul semasa orde lama, misalnya adanya desakan sejumlah politikus Islam agar dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta.³¹

Regulasi yang melemahkan posisi umat Islam terjadi pada dekade 1970-an, dimana pemerintah mengadakan restrukturisasi politik dalam usaha menciutkan peran politik masyarakat untuk suksesnya stabilitas nasional. Reproduksi sistem politik yang ditandai oleh semakin kuatnya kekuatan negara melalui ABRI, birokrasi, dan Golkar segera diikuti difusi partai. Dari sejumlah partai, diakomodasikan menjadi dua parpol: PPP dan PDI. Di samping itu reproduksi elite politik pun berlangsung. Para pemimpin politik yang kuat berakar dalam masyarakat tersingkir dan muncul para pemimpin baru yang dianggap lunak dengan pemerintah. Bersamaan dengan depolitisasi massa itu, pemerintah orde baru mencanangkan apa yang disebut dengan pembangunan nasional dengan modernisasi sebagai isu sentralnya.³²

Akibatnya terjadi fusi empat partai Islam sisa-sisa Orde Lama, yaitu Parmusi, NU, PSII dan Perti yang kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang pada saat itu berkompetitor dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) selaku partai “Oposisi” dan Partai Golkar (Golongan Karya) sebagai “mitra pemerintah” yang menjadi warna atas dinamika politik Orde Baru.

Menarik dilihat pada fase ini dimana dominasi Presiden Soeharto dalam melakukan kendali terhadap usaha transformasi ke demokrasi yang memang menjadi cita-cita ideal saat itu. Hal ini disebabkan semua basis civil society dicengkram oleh Soeharto dalam wadah korporatisnya, mulai dari KORPRI untuk pegawai pamong praja, FBSI untuk Buruh, MUI dan KAWI untuk keagamaan, PWI untuk wartawan dan sebagainya merupakan merupakan civil society yang secara in-konstitusional

³¹Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 38

³²Ahmad Amir Aziz, *Ibid*, hlm. 39

dipegang kuat oleh Soeharto melalui birokrasi, Golkar, dan tentara.³³ Sehingga sulit pada masa ini berharap akan lahirnya oposisi politik yang mampu melawan Soeharto dan militernya.

Di sini umat Islam secara tidak langsung mengalami pengkotak-kotakan dalam sebuah lembaga yang tidak lain adalah “boneka” dari rezim Orde Baru tersebut. Masa Orde Baru menjadi masa kelam bagi umat Islam jangankan untuk memikirkan cita-cita negara Islam, untuk mentransformasi sistem Tirani ke demokrasi-pun harus menunggu sampai kejatuhan Soeharto pada Mei 1998.

Namun, ada fenomena menarik dalam politik Indonesia di awal tahun 1990 yakni, adanya hubungan mesra pemerintah Orde Baru pasca 1966 dengan segmen penting kelompok Islam. Sebelum dekade 1990, banyak pengamat asing Indonesia yakin, bahwa pemerintahan Soeharto adalah kelompok yang secara kuat mempertahankan nilai-nilai Jawa abangan,³⁴ dan menentang apapun yang bermaksud mengembangkan pengaruh Islam dalam politik dan masyarakat Indonesia.

Tetapi kemudian adalah Soeharto sendiri yang pada 6 Desember 1990 meresmikan pembentukan organisasi sosial Islam yang terbaru dan kontroversial yaitu, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Walaupun pendirian organisasi cendekiawan tersebut cukup mengejutkan banyak pengamat asing, mayoritas masyarakat Indonesia sadar benar bahwa restu Presiden hanyalah salah satu rentetan pendekatan Soeharto kepada umat Islam. Tetapi bagi banyak non-Muslim dan kelompok sekuler, tindakan Presiden tersebut merupakan sebuah sikap yang menyimpang dari prinsip-prinsip non-sektarian Orde Baru. Menurut pihak yang kontra ICMI dianggap sebagai organisasi yang akan mempromosikan Islamisasi dalam negara dan masyarakat Indonesia.³⁵

Gibb berkata: “Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai

³³Gregorius Sahdan, *Jalan Transaksi Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Joga Mandiri, 2004), hlm. 230

³⁴Hal ini mengacu pada teori Geertz tahun 1960. Dari bahasa Jawa berarti “merah”, abangan mengacu kepada orang-orang Jawa yang kurang kemuslimannya dibandingkan dengan mereka yang santri atau Muslim “ortodoks”.

³⁵Robert W. Hefner, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, editor: Moeftich Hasbullah, (Bandung : Fokus Media, 2003), hlm. 134

metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan dan institusi.”³⁶ Pernyataan ini dapat menjawab entitas politik Islam pada masa reformasi dimana pada masa reformasi kekuatan politik Islam bermunculan dari berbagai elemen dan simbol-simbol Islam.

Era reformasi banyak melahirkan partai Islam atau partai yang berbasis dukungan massa Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya.

Reformasi seakan menjadi “napas baru” bagi perkembangan sosial, hukum, kebebasan pers dan politik di Indonesia. Begitu juga dengan kelahiran partai-partai Islam. Namun, ada sebuah keironian ketika munculnya partai-partai Islam yang tumbuh “bagaikan jamur di musim hujan” hal ini terkesan menimbulkan watak oportunistis dari parpol Islam yang seakan “bersaing” menjadikan partainya sebagai alternatif tunggal dalam mengisi posisi kepemimpinan pasca ditinggal Soeharto.

Tabel berikut dapat memperjelas perkembangan Partai Politik Islam dari masa ke masa dalam keikutsertaannya dalam Pemilu semenjak Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.

Pemilu	Partai	Suara (%)
1955	Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI	43,9
1971	NU, Parmusi, PSII, Perti	27,1
1982	PPP	29,3
1987	PPP	27,8
1992	PPP	16,0
1997	PPP	22,0
1999	PPP, PBB, PK, PNU, PP, PPI, Masyumi, PSII, PKU, KAMI, PUI, PAY, PIB, SUNI, PSII 1905, PMB dan PID	17,8
2004	PPP, PBB, PKS, PBR dan PPNU	21,17

* Dikutip dari berbagai sumber

Dari tabel ini terlihat bahwa parpol Islam tidak memiliki *elaktibilitas* yang signifikan. Partai-partai tersebut jika digabungkan juga tidak dapat menguasai separuh dari suara mata pilih. Berdasarkan hasil Pemilu 1999 hanya PPP (58 kursi) dan PBB (13 kursi) yang lolos *electoral threshold*,

³⁶Dhiauddin Rais, *Ibid*, hlm. 6

sedangkan yang lain sebanyak 15 partai tidak lolos *electoral threshold*. Di antara partai-partai yang tidak lolos ini kemudian dalam menghadapi Pemilu 2004 mengubah partainya dengan nama baru atau menambah nama di belakang nama partainya, seperti PK menjadi PKS dan PPNUI menjadi PPNUI, sementara pecahan PPP membentuk PBR.³⁷

Masa reformasi juga membuat para ulama terpolarisasi sedemikian rupa. Misalnya, kampanye Pemilu 1999, diwarnai dengan menghamburnya para Kiai untuk membela partai politiknya masing-masing sesuai dengan “keulamaan” mereka. Ulama-ulama NU terdapat di partai PKB, yang merupakan satu-satunya partai yang direstui PBNU. Secara individu, para Kiai NU mendirikan partai-partai seperti PKU yang didirikan K.H. Yusuf Hasyim, PNU oleh K.H. Syukron Makmun dan yang terpenting tentu PPP yang banyak didukung ulama NU seperti K.H. Alawi Muhammad, K.H. Maimun Zubair, serta kebanyakan ulama Betawi yang sangat berpengaruh pada kemenangan PPP di Jakarta.³⁸

Lebih lanjut ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi juga turut andil dalam pembentukan partai. Mereka tergabung dalam PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan halaqah kampus turut mendirikan partai Islam yaitu, partai keadilan (belakangan menjadi PKS) yang menarik sebagian ulama alumnus Timur Tengah.³⁹ Belakangan PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi pendukung suaranya berasal dari massa Islam.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah *euforia* politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Lahirnya reformasi memang memberikan angin segar bagi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.

³⁷Hatamarrasyid, *Politik Aliran dan Posisi Partai Politik Islam dalam Pemilu di Indonesia*, disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Politik Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2008.

³⁸Musrifah Sunanto, *Ibid*, hlm. 90

³⁹*Ibid*

PENUTUP

Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja Muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islamisasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi politik Hindu Budha, terhitung hanya secara kultur-budaya saja agama Hindu-Budha masih mendominasi pola keberagamaan Nusantara. Masa kolonial menjadi titik kemunduran politik Islam sebagai satu-satunya basis politik yang selama berabad-abad tetap eksis, kerajaan-kerajaan tidak dapat lagi membendung kolonialisme. Namun, ada sisi positif akibat lemahnya posisi raja Islam kala itu, yakni munculnya perlawanan terhadap penjajahan dari berbagai basis kekuatan Islam seperti: para bangsawan, ulama dan rakyat jelata. Masing-masing kelompok ini mempunyai massa yang dapat digerakkan sewaktu-waktu. Masa ini juga pada akhirnya melahirkan berbagai organisasi Islam sebagai wadah perjuangan umat untuk menghadapi penjajahan, sehingga pada masa ini lahir Syarikat Islam, Muhammadiyah hingga Nahdhalatul Ulama.

Masa Orde Lama dan Orde Baru pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan untuk menata kekuatan ekonomi daripada politik. Politik Indonesia secara umum dan politik Islam secara khusus benar-benar dalam genggaman birokrasi dan militer. Umat Islam memang cenderung menampilkan *resistensi* dan kurang terlibat dalam proses pembangunan, umat Islam dalam hal ini berada dalam posisi marginal. Hubungan Islam dan negara dengan sendirinya menciptakan jarak karena disharmonisasi dan terkesan antagonis antar keduanya. Kondisi massa Islam pun terbelah dalam dinamika wacana Islam atau wacana kebangsaan yang berlarut-larut. Sebaliknya, masa reformasi dianggap menjadi titik kebangkitan umat Islam karena terjadi reformasi politik, akan tetapi perubahan tersebut tetap tidak mampu menyatukan institusi politik Islam. Partai-partai Islam yang banyak muncul hanya memperlebar disintegrasi politik sehingga pada masa ini justru umat Islam lebih memilih partai berideologi non-Islam. Hal ini terbukti dengan kemenangan partai politik pada Pemilu 1999 yaitu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Pemilu 2004 Partai Golongan Karya (Golkar) dan Pemilu 2009 Partai Demokrat, masing-masing adalah partai nasionalis yang dapat memenangkan suara mayoritas ketimbang partai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Harjono. *Perjalanan Politik Bangsa*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Firdaus, A.N. *Syarikat Islam Bukan Budi Utomo: Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa*. Jakarta : Datayasa, 1997.
- Hefner, Robert W. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, editor: Moeflich Hasbullah. Bandung : Fokus Media, 2003.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1999.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*. Jakarta: PT. Karya Uniperss, 1989.
- Musrifah, Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rodee, Carlton Clymer dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988.
- Sahdan, Gregorius. *Jalan Transaksi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004.
- Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jilid I. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.